



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Panlawan No. 56 Sidoarjo Kode Pos 61213
Telp. (031) 8941878 – 8963227 Faks : (031) 8926159
E-mail : bpkad@sidoarjokab.go.id website: bpkad.sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 26 Februari 2023
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Dibarengatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE
NIP. 197203171 996022001

CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001

FORMULIR CHECK LIST REVIEW

NO.		PERNYATAAN	CHECK LIST		DATA PENDUKUNG
			YA	TIDAK	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓		
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓		
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓		
		4. LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓		
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan (M)	✓		
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓		
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓		
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓		
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke unit penyusun LKj	✓		
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓		
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya (M)	✓		
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓		
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya (M)	✓		
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓		
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓		
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓		
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓		
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓		
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓		
		9. Jika "tidak" telah mendapat penjelasan yang memadai			
		10. IKU dan IK telah SMART	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan-Nya, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam tahun 2022 dengan baik.

Dengan berjalannya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yang merupakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. LKjIP tahun 2022 pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. LKjIP tahun 2022 ini diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta berguna bagi semua pihak.

Sidoarjo, 31 Januari 2023
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

CHUSNUL INAYAH, SE
Pamona Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan-Nya, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam tahun 2022 dengan baik.

Dengan berjalannya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yang merupakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. LKjIP tahun 2022 pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. LKjIP tahun 2022 ini diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta berguna bagi semua pihak.

Sidoarjo, 31 Januari 2023
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP-19720317 199602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan	1
1.2 Aspek Strategis OPD	2
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Tujuan dan Sasaran	4
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	4
2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022	5
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 Pengukuran Kinerja	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja	8
3.3 Realisasi Anggaran	23
BAB IV : PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	2
Tabel 1.2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah	3
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	5
Tabel 2.2 Rincian Anggaran pada Tahun 2022	5
Tabel 3.1 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja.....	7
Tabel 3.2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja	7
Tabel 3.3 Realisasi kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	8
Tabel 3.4 Perhitungan aset tetap terdokumentasi legal	8
Tabel 3.5 Jumlah tanah yang bersertifikat	10
Tabel 3.6 Perbandingan capaian kinerja di tingkat nasional	12
Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja di tingkat provinsi	12
Tabel 3.8 Perbandingan capaian kinerja dibandingkan kabupaten/kota lain.....	13
Tabel 3.9 Perkembangan kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Tahun 2021 - 2022	14
Tabel 3.10 Perkembangan kinerja sasaran pertama terhadap target akhir Renstra	14
Tabel 3.11 Realisasi kinerja program dan kegiatan	15
Tabel 3.12 Realisasi kinerja sasaran kedua.....	18
Tabel 3.13 Perkembangan kinerja sasaran kedua Tahun 2021 – 2022	21
Tabel 3.14 Perkembangan kinerja sasaran kedua terhadap target akhir Renstra.....	21
Tabel 3.15 Realisasi kinerja dan keuangan.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Realisasi kinerja sasaran pertama Tahun 2022	9
Grafik 3.2 Perkembangan kinerja sasaran pertama dibanding Kabupaten/Kota	13
Grafik 3.3 Perkembangan kinerja sasaran pertama dibanding Tahun 2021	14
Grafik 3.4 Perkembangan kinerja sasaran pertama dibanding target akhir renstra	15
Grafik 3.5 Perkembangan kinerja sasaran kedua dibanding Tahun 2021	15
Grafik 3.6 Perkembangan kinerja sasaran kedua dibanding target akhir Renstra	22



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021 – 2026, yang secara detail dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

LKjIP juga menjadi sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good and clean governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran – sasaran strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan kinerja utama yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo, dapat diidentifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 717.542.488.056,00 atau 97,50% dari pagu sebesar Rp. 735.941.965.426,00. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2022 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, disampaikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	Sangat Baik
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,87%	Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100%	Sangat Baik
		Nilai RB	94,79%	Sangat Baik
		Nilai IPP	100%	Sangat Baik
		Nilai SKM	100%	Sangat Baik
		Persentase Penyerapan Anggaran	108,33%	Sangat Baik

Sumber Data : Laporan Keuangan dan laporan BMD

KETERANGAN :

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 < 90	Baik
3	70,01 < 80	Cukup
4	0 < 70,01	Kurang

Sehingga 2 (dua) sasaran pada Tahun 2022 rata – rata realisasi kinerja mencapai 100% atau kategori sangat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

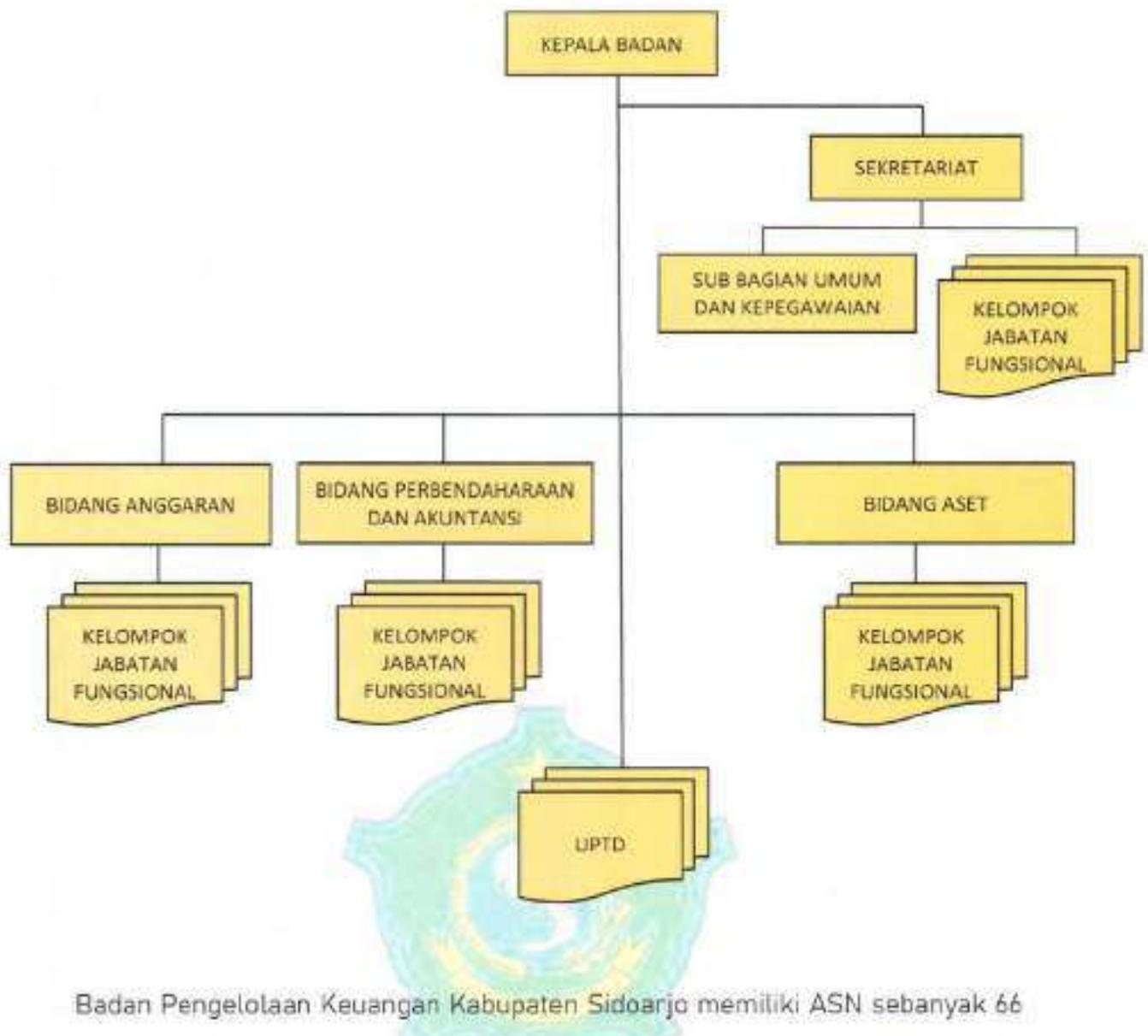
1.1 Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada Sebagian fungsi penunjang keuangan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan termasuk aset daerah". Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Badan;
5. Pelaksanaan fungsi BUD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.



Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 66 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Data ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Administrator	3
3	Pengawas	1
4	Pelaksana	51
5	Jabatan Fungsional Ahli	10

2.1 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat

perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Menjaga dan mengoptimalkan kinerja BPKAD, dalam mengelola keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD di masing – masing PD belum optimal; 2. Masih banyak aset tanah milik Pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan PD; 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN; 4. Setiap tahun barang milik daerah Pemkab Sidoarjo akan terus bertambah.

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal;
2. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD;
3. Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset;
4. Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi "Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi I (satu) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha".

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan yang akan kami dukung adalah "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha" dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran "Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital" yang dituju. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,85%

Sumber Data: Renstra BPKAD Tahun 2021 - 2026

Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada tahun 2021 indikator Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP dengan target 100% dengan pertimbangan capaian tahun lalu 100%, dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 100%, sehingga target kinerja tahun 2022 ditetapkan sama dengan tahun 2021.

Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada tahun 2021 indikator Persentase aset tetap terdokumentasi legal dengan target 99,752% dengan pertimbangan capaian tahun lalu 99,50%, dan target di Renstra tahun 2022 sebesar 99,85%, sehingga target kinerja tahun 2022 meningkat adalah 0,01%.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A
		Nilai RB	36,3 (100%)
		Nilai IPP	A-
		Nilai SKM	Sangat Baik
		Persentase Penyerapan Anggaran	90%

Pada indikator kinerja tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikoordinasikan oleh Bappeda, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun.

2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp.731.964.975.048,00, namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 739.605.652.632,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2 dan 2.3.

Tabel 2.2
Perencanaan Anggaran pada Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INTERVENSI PROGRAM
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Serapan anggaran, Nilai SAKIP, IPP, Nilai SKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.3
Rincian Anggaran pada Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.166.892.011	10.276.064.370
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.661.498.985	1.674.016.147
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.219.000	482.438.501
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.482.665.200	1.542.990.850
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.000.000	566.475.000
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.429.122.390	1.284.282.390
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	477.492.380	474.649.480
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	938.502.530	784.958.730
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	705.978.101.722	714.140.018.846
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	630.877.500	542.343.500
		Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	8.420.619.900	6.799.431.388
		Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.052.083.430	1.032.083.430
Total Anggaran			731.964.975.048	739.605.652.632

Sumber Data : DPPA BPKAD Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$> 90,01$	Sangat Baik
2	$80,01 \leq 90$	Baik
3	$70,01 < 80$	Cukup
4	$0 < 70,01$	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan	99,87%	Sangat Baik

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
	pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	100,63%	Sangat Baik

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

1. Sasaran pertama Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Sesuai Ketentuan dan Akuntabel

Dalam sasaran pertama untuk Tahun 2022 rata - rata nilai capaian kinerjanya sebesar 99,87%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama:

Tabel 3.3

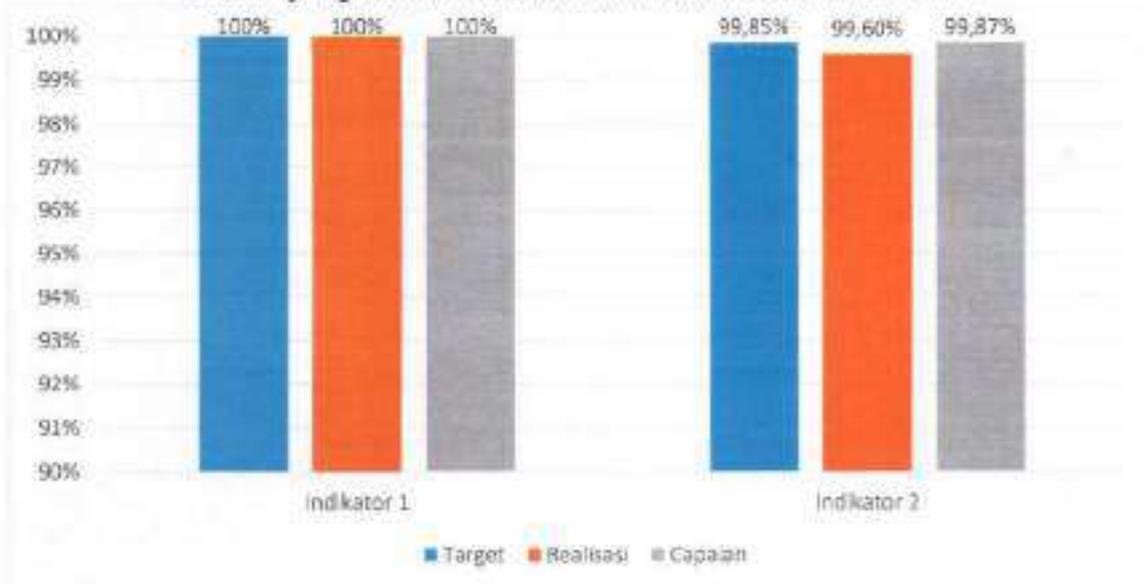
Realisasi kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%	100%
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,85%	99,60%	99,75%

Sumber Data: Laporan Keuangan dan Laporan BMD

Grafik 3.1

Realisasi kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator, sebagai berikut:

- a. Indikator pertama persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP. Pengukuran tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan yang disusun perangkat daerah dengan prinsip - prinsip akuntansi yang ada, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang laporannya sesuai SAP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Adapun SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) adalah prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perangkat daerah. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator pertama persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP dapat direalisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Indikator kedua persentase aset tetap terdokumentasi legal

Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumentasi legal tersebut berupa:

- 1) Tanah berupa Sertifikat (diterbitkan oleh BPN);
- 2) Kendaraan Bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri);
- 3) Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima.

Pengukuran indikator persentase aset tetap terdokumentasi legal dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aset tetap terdokumentasi legal}}{\text{Jumlah aset tetap}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator kedua persentase aset tetap terdokumentasi legal dapat direalisasikan sebesar 99,60% dari target yang ditetapkan 99,85% sehingga capaian kinerja sebesar 99,87%.

Sedangkan apabila ditampilkan dalam bentuk tabel, maka rincian dokumentasi legal untuk aset tetap, sebagai berikut :

Tabel 3.4

Aset Tetap Terdokumentasi Legal

Total Aset Tetap	Aset Tetap Berupa Tanah	Tanah Telah Bersertifikat	Tanah Belum Bersertifikat	Total Aset Tetap terdokumentasi Legal	% Aset Tetap Terdokumentasi Legal
452.005	2.678	709	1.969	450.036	99,56

*) unaudited

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan proses legalisasi aset tanah melalui BPN Kabupaten Sidoarjo, dengan perkembangan berkas yang dalam proses setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jumlah Tanah yang Bersertifikat

Tahun	Jumlah Berkas
2014	1
2019	8
2020	14
2021	606
2022	80
Total	709

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan agar semakin banyak OPD yang melaporkan Laporan Keuangannya sesuai SAP yaitu:

- 1) Pendampingan dan verifikasi penyusunan APBD/PAPBD;
- 2) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- 3) Rekonsiliasi pendapatan dan belanja setiap bulan;
- 4) Rekonsiliasi laporan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi yang efektif;
- 6) Bimbingan teknis keuangan daerah;
- 7) Pengembangan dan optimalisasi SIKSOA;

Sedangkan upaya yang dilakukan agar semakin banyak aset tetap yang terdokumentasi legal adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;
- 2) Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
- 3) Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan;
- 4) Sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa dengan bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN;
- 5) Memasang papan nama kepemilikan dan tanda batas tanah.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Aparatur pengelolaan keuangan daerah belum memahami terkait pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari:
 - a) Penyusunan perencanaan & penganggaran;
 - b) Pelaksanaan anggaran;
 - c) Penatausahaan keuangan;
 - d) Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - e) Penyusunan laporan keuangan.*
- 2) Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA) dengan sistem informasi BMD (SIM BMD)
- 3) Aparatur pengelolaan BMD belum memahami terkait pengelolaan barang milik daerah:
 - a) Perencanaan & penatausahaan BMD,
 - b) Penggunaan & pemanfaatan BMD,
 - c) Pengamanan & pemindahtanganan BMD.
- 4) Kerjasama pengelolaan aset daerah;
 - a) Terdapat aset - aset daerah yang belum termanfaatkan;
 - b) Belum adanya komitmen terhadap pengelolaan dan penertiban aset PSU.
- 5) Koordinasi dalam proses pensertifikatan;
- 6) Adanya penolakan proses pensertifikatan aset pemerintah daerah oleh pemerintah desa.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada tingkat Nasional maka capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP ini sama, dikarenakan laporan keuangan yang sesuai SAP merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Nasional.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Nasional
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,60%	-

Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada tingkat Provinsi maka capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP ini sama, dikarenakan laporan keuangan yang sesuai SAP merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), adapun dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 disebutkan bahwa salah satu indikator kinerja adalah opini audit BPK dengan target WTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Provinsi
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,60%	-

Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota maka capaian kinerja untuk indikator kinerja :

1. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP ini sama, dikarenakan laporan keuangan yang sesuai SAP merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), adapun dalam Renstra BPKAD Kabupaten

Gresik salah satu indikator kinerja adalah Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan sesuai Ketentuan, dalam tata kelola keuangan tersebut meliputi juga laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja.

2. Persentase aset tetap Terdokumentasi legal lebih rendah jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto. Salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja terutama sehubungan dengan percepatan pensertifikatan tanah adalah dengan melaksanakan studi komparasi terkait pengamanan BMD ke Kabupaten/Kota lain yang telah berhasil dalam percepatan pensertifikatan tanah.

Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain

No:	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%	BPKAD Kabupaten Gresik
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,60%	100%	BPKPD Kota Mojokerto

Sumber Data: Renstra BPKAD Kabupaten Gresik & BPKPD Kota Mojokerto

Grafik 3.2

Perkembangan kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan Dibanding Kabupaten/Kota



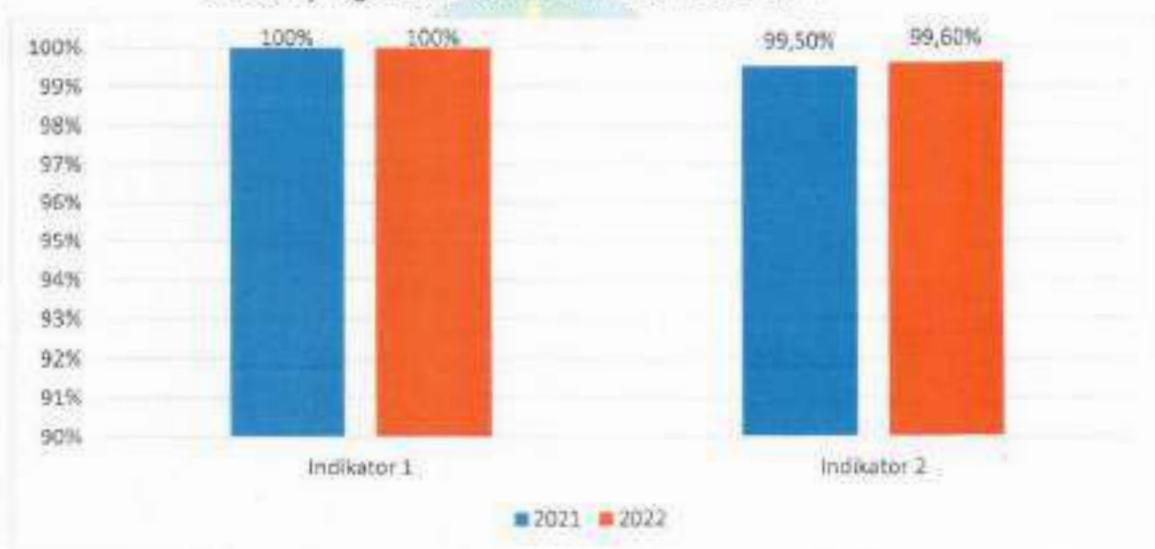
Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran pertama Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah aset tetap berupa tanah yang telah bersertifikat. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

Tabel 3.9
Perkembangan kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,50%	99,60%

Sumber data : LKjIP Tahun 2021

Grafik 3.3
Perkembangan kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan Tahun 2021-2022



Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

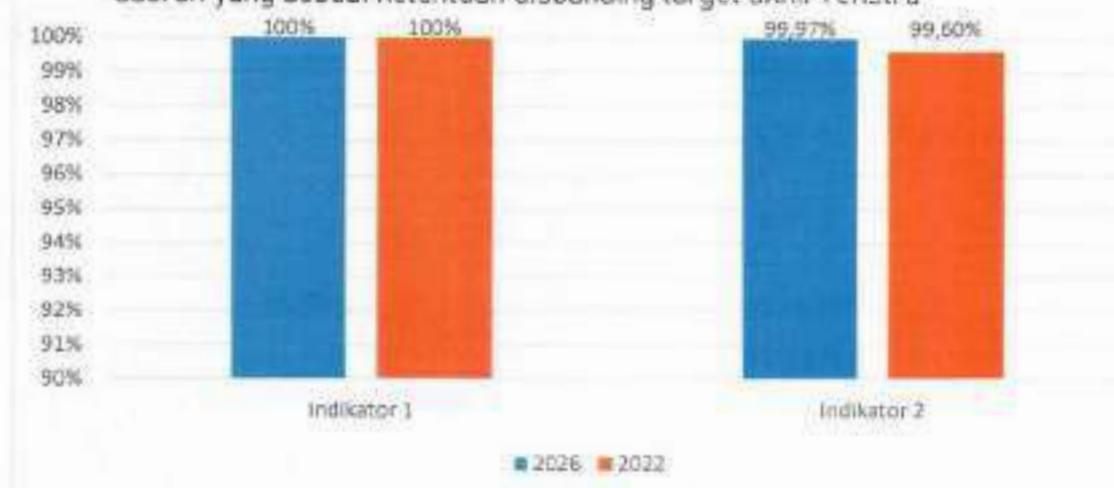
Tabel 3.10
Perkembangan kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Terwujudnya pengelolaan	Persentase laporan keuangan perangkat	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
	keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	daerah yang sesuai SAP			
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,97%	99,60%	99,63%

Grafik 3.4

Perkembangan kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dibanding target akhir renstra



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel adalah sebesar Rp.735.941.965.426,00 dengan realisasi sebesar Rp. 717.542.488.056,00 Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel.

Tabel 3.11
Realisasi kinerja program dan kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	14.547.884.868,00	14.082.953.753,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	2 Tahapan	2 Tahapan	5.900.000,00
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi			

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
		kinerja yang ditindaklanjuti				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	80%	92,50%	10.274.014.370,00	10.032.546.437,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	1.674.016.147,00	1.595.574.010,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	7 Unit	7 Unit	482.438.501,00	475.972.301,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	80%	87,04%	1.562.990.850,00	1.427.265.415,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	565.475.000,00	545.706.390,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	713.020.222.240,00	697.376.712.328,00
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	96,20%		
		Persentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase Dokumen kebijakan yang tersusun	100%		
	2. Persentase Dokumen anggaran daerah yang tersusun	100%	100%			

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%	414.649.480,00	444.382.300,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	784.958.730,00	772.440.208,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	96,2%	710.476.331.640,00	694.954.731.477,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat	49,45%	28%	8.373.858.318,00	6.082.821.975,00
		Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	100%	100%		
		Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%		
		Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%		
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN	100%	100%	8.373.858.318,00	6.082.821.975,00
		Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses	100%	100%		
		Jumlah OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	48 OPD	48 OPD		
		Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%		
Total					735.941.565.426,00	717.542.488.056,00

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja:

- a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;

- b. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja;
- c. Rekonsiliasi laporan keuangan;
- d. Penyusunan kebijakan akuntansi;
- e. Bimtek keuangan daerah;
- f. Pengembangan aplikasi SIKSDA;
- g. Pembangunan sistem informasi persediaan;
- h. Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;
- i. Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
- j. Membangun koordinasi dan sinergi dengan BPN;
- k. Sosialisasi secara massif ke desa melalui kecamatan;
- l. Memasang papan nama kepemilikan dan tanda batas tanah;
- m. Membentuk tim kortap di masing-masing DPD;
- n. Bimtek pengelolaan barang milik daerah;

2. Sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam sasaran kedua untuk Tahun 2022 rata – rata nilai capaian kinerjanya sebesar 100,63%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Kedua:

Tabel 3.12

Realisasi kinerja sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100%
		Nilai RB	36,3 (100%)	34,41 (94,79%)	94,79%
		Nilai IPP	A-	A-	100%
		Nilai SKM	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
		Persentase Penyerapan Anggaran	90%	97,50%	108,33%

Sumber Data: LHE SAKIP, LHE RB, Hasil Penilaian IPP, Hasil SKM, LRA

Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 (lima) indikator sebagai berikut:

- a. Indikator pertama Nilai SAKIP.

Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif

pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator nilai SAKIP terealisasi dengan nilai A dari target yang ditetapkan yaitu nilai A, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

b. Indikator kedua Nilai RB,

Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator nilai RB terealisasi 34,41 sehingga dibawah target yang ditetapkan 36,3 dengan capaian kinerja sebesar 94,79%.

c. Indikator ketiga Nilai IPP

Indeks penilaian pelayanan publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator nilai IPP terealisasi dengan nilai A- dan target yang ditetapkan A-, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

d. Indikator keempat Nilai SKM

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator nilai SKM terealisasi dengan nilai sangat baik dari target yang ditetapkan sangat baik, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

e. Indikator kelima Persentase Penyerapan Anggaran

Serapan anggaran adalah besaran persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah berupa laporan keuangan yang disebut laporan realisasi anggaran atau LRA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Jumlah Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.12 diatas, indikator persentase penyerapan anggaran terealisasi sebesar 97,50% dari target yang ditetapkan 90% sehingga capaian kinerja sebesar 100,63%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Sosialisasi secara terus menerus tentang reformasi birokrasi dan SAKIP;
- b. Penyusunan pohon kinerja, untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama dalam pencapaian kinerja organisasi dan terdistribusi ke seluruh pegawai;
- c. Peningkatan kualitas evaluasi internal sehingga dapat memberikan feedback dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
- d. Peningkatan kapasitas pegawai secara berkala melalui pelatihan maupun bentuk peningkatan kompetensi lain secara menyeluruh;
- e. Pembuatan sarana dan prasarana penunjang guna peningkatan mutu pelayanan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran kedua adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua pegawai memahami tentang reformasi birokrasi dan SAKIP;
- b. Terbatasnya lahan sehingga menghambat dalam upaya memaksimalkan pemenuhan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas layanan;
- c. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pelayanan publik masih terbatas.

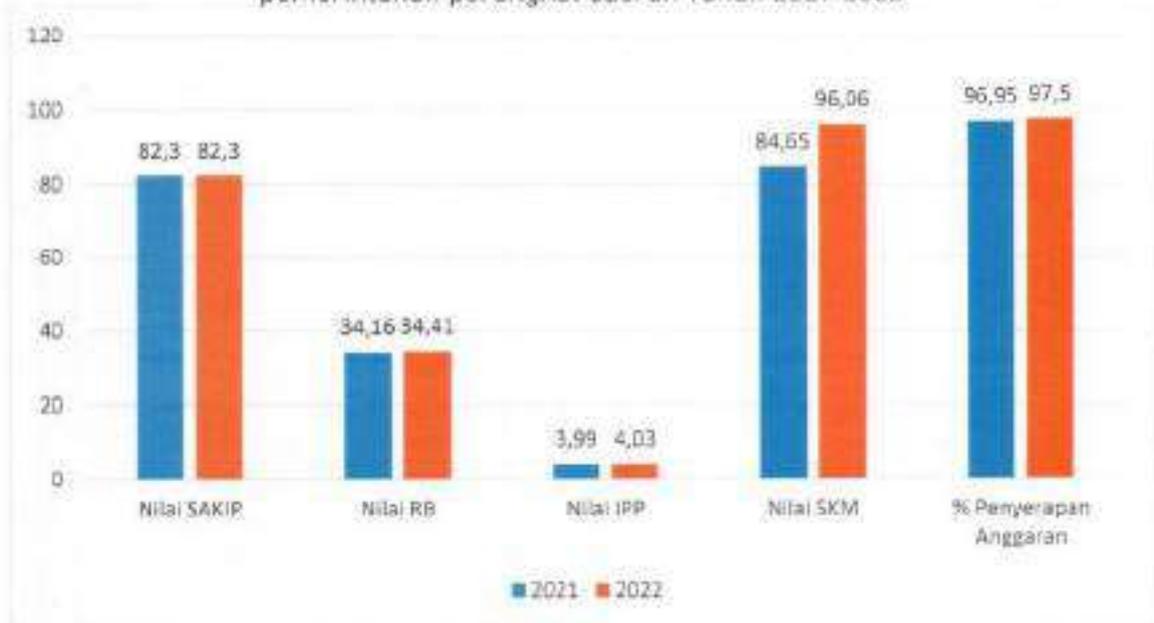
Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas layanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

Tabel 3.13
Perkembangan Kinerja Sasaran Kedua Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan perangkat daerah Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	A
		Nilai RB	34,16 (94,10%)	34,41 (94,79%)
		Nilai IPP	B	A-
		Nilai SKM	Sangat Baik	Sangat Baik
		Persentase Penyerapan Anggaran	96,95%	97,50%

Sumber Data: LHE SAKIP, PMPRB, LHE IPP, LHE SKM dan LRA Tahun 2022

Grafik 3.5
Perkembangan kinerja sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah Tahun 2021-2022



Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3.14
Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	A	100%
		Nilai RB	36,3 (100%)	34,41 (94,79%)	94,79%
		Nilai IPP	A-	A-	100%
		Nilai SKM	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
		Persentase Penyerapan Anggaran	90%	97,50%	108,33%

Sumber Data : Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026

Grafik 3.6

Perkembangan kinerja sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah disbanding target akhir renstra



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar Rp.735.941.965.426,00 dengan realisasi sebesar Rp. 717.542.488.056,00 Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja:

- Sosialisasi secara terus menerus tentang reformasi birokrasi dan SAKIP;
- Penyusunan pohon kinerja, untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama dalam pencapaian kinerja organisasi dan terdistribusi ke seluruh pegawai;

- c. Peningkatan kualitas evaluasi internal sehingga dapat memberikan feedback dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
- d. Peningkatan kapasitas pegawai secara berkala melalui pelatihan maupun bentuk peningkatan kompetensi lain secara menyeluruh salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan *capacity building*.
- e. Pembuatan sarana dan prasarana penunjang guna peningkatan mutu pelayanan.

3.3. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.15
Realisasi kinerja dan keuangan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	125	14.547.884.668,00	14.082.953.753,00	96,80
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	2 Tahapan	2 Tahapan	100	5.900.000,00	5.869.200,00	99,82
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	80%	97,50%	121,87	10.276.064.370,00	10.032.546.437,00	97,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	125	1.674.016.147,00	1.595.574.610,00	95,31
	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	7 Unit	7 Unit	100	482.436.501,00	475.972.301,00	98,66
	Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	80%	87,04%	108,8	1.542.990.850,00	1.427.265.415,00	92,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100	566.475.000,00	545.706.390,00	96,33
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampalan Dokumen Rancangan KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	713.020.222.240,00	697.376.712.328,00	97,81
		Ketepatan waktu penyampalan Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100			

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100			
		Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	96,20%	96,2			
		Prosentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%	100			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase Dokumen kebijakan yang tersusun	100%	100%	100	1.284.282.390,00	1.205.138.343,00	93,64
		2. Persentase Dokumen anggaran daerah yang tersusun	100%	100%	100			
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbandaharaan Daerah	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%	100	474.649.480,00	444.382.300,00	93,62
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100	784.958.730,00	772.460.208,00	98,41
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	96,2%	96,2	770.476.331.640,00	694.954.731.477,00	97,82
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat	49,45%	28%	56,62	8.373.858.318,00	6.082.821.975,00	72,64
		Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	100%	100%	100			
		Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%	100			
		Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%	100			
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN	100%	100%	100	8.373.858.318,00	6.082.821.975,00	72,64
		Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses	100%	100%	100			
		Jumlah OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	48 OPD	48 OPD	100			
		Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%	100			
		Total				135.941.965.426,00	777.542.488.056,00	97,50

Sumber Data : Laporan realisasi anggaran TA 2022

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya atas sasaran Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel dengan indikator:

- a. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 100%, dan penyerapan anggaran sebesar 97,81% sehingga diperoleh sebesar 2,19%. Efisiensi tersebut disebabkan antara lain dengan atas penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan baik melalui tatap muka ataupun daring;
- b. Persentase aset tetap terdokumentasi legal, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 99,75 %, dan penyerapan anggaran sebesar 72,64% sehingga diperoleh sebesar 27,11%. Efisiensi tersebut disebabkan antara lain penerbitan symphony untuk pengurusan pensertifikatan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional tidak dikenakan biaya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu 2 (dua) sasaran dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

Terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. Aparatur pengelolaan keuangan daerah belum memahami terkait pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan perencanaan & penganggaran;
 - b. Pelaksanaan anggaran;
 - c. Penatausahaan keuangan;
 - d. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - e. Penyusunan laporan keuangan.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA) dengan sistem informasi BMD (SIM BMD)
3. Aparatur pengelolaan BMD belum memahami terkait pengelolaan barang milik daerah:
 - a. Perencanaan & penatausahaan BMD;
 - b. Penggunaan & pemanfaatan BMD;
 - c. Pengamanan & pemindahtanganan BMD.
4. Kerjasama pengelolaan aset daerah;
 - a. Terdapat aset - aset daerah yang belum termanfaatkan;
 - b. Belum adanya komitmen terhadap pengelolaan dan penertiban aset-PSU.
5. Koordinasi dalam proses pensertifikatan;
6. Adanya penolakan proses pensertifikatan aset pemerintah daerah oleh pemerintah desa.

B. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal pada tahun berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara upaya, antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi penyusunan APBD/PAPBD untuk mengurangi terjadinya kesalahan pemilahan kode rekening pendapatan/belanja;
- b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan sehingga mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan;
- c. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja dengan OPD yang dilaksanakan tiap bulan;
- d. Rekonsiliasi laporan keuangan dengan OPD yang dilaksanakan tiap triwulan;
- e. Penyusunan kebijakan akuntansi sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah;
- f. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah dengan melaksanakan bimtek keuangan daerah;
- g. Pengembangan aplikasi SIKSDA.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Rekonsiliasi laporan BMD yang dilaksanakan tiap triwulan;
- b. Optimalisasi SIM BMD;
- c. Melakukan penilaian terhadap obyek - obyek sewa BMD
- d. Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;
- e. Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
- f. Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan;
- g. Sosialisasi secara massif ke desa melalui kecamatan;
- h. Memasang papan nama kepemilikan dan tanda batas tanah;
- i. Membentuk tim korlap di masing-masing OPD untuk percepatan pensertifikatan tanah.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

Link: https://drive.google.com/file/d/16DCyXJP7y_-FnSmIMsZ6gy8YyD1Ao3hN/view?usp=share_link

2. IKU

Link: https://drive.google.com/file/d/1_PyqrMhUE79zxdmGbLaQfaxEoG6aQ_mB/view?usp=share_link

3. Rencana Aksi

Link: https://drive.google.com/file/d/1LLXMWjFJOk2zotUXnmBvicYn_mL3Dhfd2/view?usp=share_link

4. Pohon Kinerja

Link: https://drive.google.com/file/d/1JYREZX7wqSs9lcBdGQcXYEK_BnFaVsNN5/view?usp=share_link

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

Link: https://drive.google.com/file/d/16DCyXJP7y_FnSmIMsZ6gy8YyD1Ao3hN/view?usp=share_link

2. IKU

Link: https://drive.google.com/file/d/1_PyqrMhUE79zxdmGbLaQfqxEoG6aQ_mB/view?usp=share_link

3. Rencana Aksi

Link: https://drive.google.com/file/d/1LLXMWjFJOk2zotUXnmBVicYnmL3Dhfd2/view?usp=share_link

4. Pohon Kinerja

Link: https://drive.google.com/file/d/1JYREZX7wqSs9lcBdGQcXYEKBnFaVsNN5/view?usp=share_link

